

### BAB III

#### PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM

#### DALAM PUTUSAN PN. SURABAYA NO.33/Pid.Sus/2012 TENTANG

#### KASUS PUNGUTAN LIAR

##### A. Deskripsi Kasus dan Landasan Hukum

Dalam putusan No.33/Pid.Sus/2012/PN.SBY tentang tindak pidana pungutan liar diketahui bahwa identitas terdakwa adalah bernama Drs. Hamzah Fajri, lahir di Lampung pada tanggal 05 April 1969, jenis kelamin laki-laki, beragama Islam, berusia 42 tahun, yang bertempat tinggal di Jl. Kerinci No. 57 Perum Pepelegi Indah Waru Kabupaten Sidoarjo, terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang.<sup>1</sup>

Dalam hal ini terdakwa Drs. Hamzah Fajri selaku kepala kelurahan Kebraon. Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang terdiri dari : Nurul Anwar, SH., dan Helmy Wicaksono Putro, SH, MH., para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "Kosgoro" Propinsi Jawa Timur, berkantor di Surabaya, Jalan Raya Dipenogoro 28, berdasarkan surat kuasa Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 17 April 2012, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 April 2012 Nomor : 443/HK/IV/2012.

---

<sup>1</sup> Berkas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.33/Pid.Sus, 1.

- Didalam pelaksanaan kegiatan PRONA tahun 2011 diwilayah Kelurahan Kebraon, terdakwa Drs. Hamzah Fajri selaku Kepala Kelurahan Kebraon dan Ketua Penanggung Jawab kegiatan PRONA tahun 2011 dengan melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaanya telah memungut biaya kegiatan PRONA, yang ditetapkan oleh terdakwa agar setiap peserta pemohon dipungut biaya sebesar Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara dicicil atau diangsur dengan pembayaran pertama minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), padahal terdakwa mengetahui untuk pelaksanaan kegiatan PRONA tersebut oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya tidak memungut biaya sama sekali atau gratis.

[illegible]

Oleh terdakwa Drs. Hamzah Fajri dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dana pungutan dari para pemohon sertifikat PRONA dipergunakan antara lain untuk transportasi & akomodasi sebesar Rp. 18.201.200,- (delapan belas juta dua ratus satu ribu dua ratus rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 28.548.800,- (dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 16.548.800,- (enam belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) disimpan oleh saudari Herlin Wahyuningsih, S.Sos.

- [illegible]

3. Pada tanggal 9 Agustus 2011, terdakwa Drs, Hamzah Fajri juga telah menerima uang dari Heru Wahyono selaku Wakil Sub Kontraktor CV. Hameri dengan alasan untuk biaya sosialisasi, dibagikan kepada warga yang dilalui kendaraan perusahaan sehubungan pelaksanaan proyek pembangunan SMPN 24 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan dibuatkan bukti kwitansi sebagai tanda penerimaan pada tanggal 9 Agustus 2011 yang diterima dan ditandatangani langsung oleh terdakwa Drs. Hamzah Fajri selaku Kepala Kelurahan Kebaron di ruang kerjanya dengan disaksikan oleh Subur Wahyudi dan terdakwa, pada tanggal 7 Juli 2010 juga telah menerima uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Eris Desnata pada saat mengurus Surat Keterangan Ahli Waris yang disaksikan oleh Hj. Sartika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana.

Atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi tertanggal 25 April

2012 dan Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan serta pendapatnya secara tertulis tertanggal 2 Mei 2012.

Dari eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya, mengadili:

1. Menolak nota keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum terdakwa seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Pidana Nomor: 33/Pid.Sus/2012/PN.Surabaya.
3. Perkara dibebankan pada putusan akhir.<sup>3</sup>

### B. Keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan Barang bukti

Selanjutnya untuk membuktikan dakwaan pada terdakwa tersebut dan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:<sup>4</sup>

1. Saksi Herlin Wahyuningsih, S.Sos. Saksi yang bekerja menjadi sekretaris ketika terdakwa menjadi lurah di kelurahan Kebraon pada tahun 2010 sampai 2011 memberikan beberapa keterangan penting diantaranya waktu itu ada program PRONA dan juga terdapat sosialisasi dari BPN bahwa proses PRONA tidak dikenakan biaya, akan tetapi oleh POKJA ditarik biaya sebesar Rp. 4.500.000,- untuk materai, legalisir, fotocopy, notaris, konsumsi rapat, konsumsi pengukuran. POKJA waktu

<sup>3</sup> Ibid, 34.

<sup>4</sup> Ibid, 34-36

Dari keterangan saksi Herlin Wahyuningsih, S.Sos, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar, namun ada keberatan yaitu bahwa bukan perintah tertulis namun himbauan kepada masyarakat dan saksi menyatakan perintah untuk menghimbau kepada masyarakat untuk memberikan uang partisipasi karena tidak ada dana untuk pra PRONA.

2. Saksi Budulukari, memberikan beberapa keterangan penting dan menyatakan bahwa benar ada kegiatan PRONA ketika terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa, saksi juga menyatakan bahwa ada surat-surat yang dibuat terdakwa dan dilegalisasi sebelum PRONA, ada penentuan atas hak untuk mendapatkan sertifikat yaitu permohonan yang diajukan ke BPN yang

untuk makan berdua Rp. 100.000,-, selain itu saksi juga menyatakan bahwa yang menetapkan biaya Rp. 4.500.000,- adalah pak lurah penanggung jawab setelah dihitung kalkulasi.

3. Saksi Soli, HS memberikan keterangan bahwa ada kesepakatan terhadap pengurusan Pra PRONA seperti ada akta jual beli, dan notaris yang mengeluarkan biaya untuk itu dan disepakati waktu sosialisasi dan tidak ada satupun calon peserta PRONA keberatan, sehingga disepakati dana sebesar Rp.4.500.000,- disepakati bersama setor pertama Rp. 1.500.000,- sebagai pertama solusi agar tidak memberatkan peserta PRONA adalah cara diangsur dan dipegang oleh saksi Herlin Wahyuningsih

- untuk makan berdua Rp. 100.000,-, selain itu saksi juga menyatakan bahwa yang menetapkan biaya Rp. 4.500.000,- adalah pak lurah sebagai penanggung jawab setelah dihitung kalkulasi.
3. Saksi Soli, HS memberikan keterangan bahwa ada kesepakatan terhadap pengurusan Pra PRONA seperti ada akta jual beli, dan notaris yang mengeluarkan biaya untuk itu dan disepakati waktu sosialisasi dan tidak ada satupun calon peserta PRONA keberatan, sehingga disepakati dana sebesar Rp.4.500.000,- sebagai disepakati bersama setor pertama Rp. 1.500.000,- sebagai pertama solusi agar tidak memberatkan peserta PRONA adalah cara diangsur dan dipegang oleh saksi Herlin Wahyuningsih



5. Saksi Totok Budi Rahardjo, SH., adalah petugas dari BPN yang melaksanakan PRONA di Kelurahan Kebraon, saksi memberikan keterangan bahwa untuk biaya pengurusan surat tidak sepenuhnya gratis, juga ada subsidi dari masyarakat yaitu untuk biaya materai, Notaris, BPHTB untuk pra PRONA ditanggung oleh masyarakat, pada waktu itu ada 24 bidang yang diajukan PRONA dan sudah selesai semuanya. Saksi juga mengatakan bahwa dari BPN melakukan sosialisasi sebelum dilakukan PRONA yang mana boleh dilakukan penarikan dana Pra PRONA kepada masyarakat yang mengurus PRONA.



6. Saksi Heru Wahyono yang mewakili perusahaan Kontraktor CV. Hameri, saksi memberikan keterangan bahwa pada waktu itu saksi ijin kepada terdakwa untuk melakukan pekerjaan urukan tanah dan saksi dimintai terdakwa uang untuk sosialisasi sebesar Rp. 15.000.000,- yaitu sosialisasi menyangkut jalan jadi dana tersebut untuk perbaikan jalan yang rusak yang dilewati oleh alat kami, Perusahaan saksi sudah memberikan Rp. 10.000.000,- jadi kurang Rp. 5.000.000,- dan sebelumnya tidak pernah diminta. setelah saksi membayar langsung kepada terdakwa, selisih 2 hari terdakwa memerintahkan untuk masuk, dan setelah saksi ditelpon katanya sudah disosialisasikan, akan tetapi ketika angkutan jalan ternyata masih dihalangi warga. Saksi juga menambahkan bahwa tidak tahu kalau uang yang saksi berikan tersebut sudah diberikan kepada masyarakat karena tidak pernah melihat bukti pemberian uang yang diserahkan LKMM.
7. Saksi Drs. Sri Budoyono yang menjabat sebagai Wakil Ketua RW. 11 Kelurahan Kebraon, memberikan keterangan bahwa saksi pernah mengajukan ijin domisili, kemudian pada waktu hari pengambilan ijin domisili dimintai uang Rp. 300.000,- oleh Bu Hermin katanya ini sudah ketentuan dari pak Lurah dan tidak boleh kurang. Selain itu ada juga seorang ibu yang mengajukan domisili untuk usaha dan juga ada untuk mengurus waris, dana yang dimintai variasi ada dana pungutan Rp. 200.000,- ada juga Rp. 100.000,-. Selain itu saksi juga mengatakan bahwa ada laporan 2 warga mengeluh tentang pungutan untuk

- Selain saksi-saksi diatas juga masih banyak saksi-saksi yang diperiksa dipersidangan dan memberikan keterangan terkait kasus pungutan liar di Kelurahan Kebraon yaitu : Mohammad Nadhor, Suwanto, Djenab, Kasliati, Moch. Amin Achmadi, Dinu Karsono, Mei Ernawati, Marliyah, Murifah,

Selanjutnya di persidangan terdakwa Dr. Hamzah Fajri melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (saksi A De Charge), dan jaksa/penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa juga tidak mengajukan pertanyaan.

Terdakwa Dr. Hamzah Fajri dipersidangan juga telah memberikan beberapa keterangan antara lain mengatakan:<sup>5</sup>

1. Bahwa terdakwa pernah menjadi Lurah Keabraon sejak tahun 2009-2011, waktu itu pernah dilaksanakan program prona sertifikat sebanyak 24 pemohon dengan biaya prona untuk BPN gratis di tanggung negara, tapi untuk pelaksanaan administrasi seperti akta notaris, materai dan persyaratan lain ditanggung oleh pemohon.
2. Bahwa terdakwa pernah menerbitkan surat perintah tentang pembentukan POKJA dengan alasan untuk pengurusan dokumen harus jelas siapa saja yang bertanggung jawab, melalui rapat intern ditetapkanlah anggota POKJA dan terdakwa selaku lurah sebagai penanggung jawab POKJA.
3. Bahwa terdakwa mengetahui besaran uang yang akan dipungut sebesar Rp. 4.500.000,- dan tidak bisa menjelaskan secara rinci biaya tersebut

<sup>5</sup> Ibid, 63.

untuk apa saja karena yang memutuskan adalah warga yang ikut program PRONA dalam rapat bersama POKJA.

4. Bahwa terdakwa tahu kalau 24 peserta PRONA diantaranya 22 peserta telah menerima sertifikat dari BPN.
5. Bahwa terdakwa pernah menerima dana titipan dari CV. Hameri sebesar Rp. 10.000.000,- dan sudah terdakwa sampaikan kepada LKMK untuk diteruskan kepada RW atau RT yang dilewati kendaraan CV. Hameri.
6. Bahwa setelah terdakwa menerima uang titipan itu terdakwa berkomunikasi dengan LKMK dan waktu itu belum tersampaikan karena bertepatan dengan pelaksanaan Ramadhan, waktu itu bulan Agustus yang banyak kegiatan kemasyarakatan dan disamping itu terdakwa memberi tahu kepada pak Heru untuk jangan melakukan pengurukan sebelum ada komunikasi dari terdakwa dan hari Minggu truk masuk lokasi sehingga warga RT dan RW mencegah.
7. Bahwa mengenai pungutan untuk saudara Eris untuk mengurus surat waris sebesar Rp. 350.000,- dan waktu itu pengurusan administrasinya belum selesai.
8. Bahwa terdakwa pernah di demo mengenai masalah apa terdakwa tidak tahu memang ada beberapa hal mengenai tanah. ada tanah-tanah yang tidak boleh digunakan untuk pembangunan oleh pengembang dan memang bukan untuk proyek pengembang tapi terdakwa tidak bersedia tanda tangan akhirnya terjadi demo yang ditunggangi oleh para pengembang.



Karena dakwaan Jaksa/Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang lebih tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan kedua, melanggar Pasal 11 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:<sup>9</sup>

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
2. Menerima hadiah atau janji
3. Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya
4. Sebagai perbuatan berlanjut

<sup>8</sup> Ibid, 73.

<sup>9</sup> Ibid, 74.

Pegawai negeri adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) huruf c UU No. 31 Tahun 1999, adalah orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; Menurut Pasal 92 ayat (1) KUHP, pegawai negeri adalah orang yang dipilih menurut pilihan yang sudah diadakan menurut Undang-undang umum kekuasaan yang sah; Sedangkan yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 1999).<sup>10</sup>

Hadiah adalah pemberian sesuatu bisa berwujud barang maupun uang, sedangkan yang dimaksud dengan janji adalah harapan akan menerima sesuatu, misalnya akan menerima barang, akan menerima pekerjaan, akan mengajak bepergian.

[illegible]





tersebut di atas, selanjutnya majelis akan menilai apakah perbuatan Terdakwa yang menerima hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, sebagai Kepala Kelurahan yang mempunyai kewenangan untuk melegalisasi semua surat-surat yang dibutuhkan oleh warga.

Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pemberian atau pemungutan sejumlah uang dari warga, tidak dapat dilepaskan dari jabatan terdakwa selaku Kepala Kelurahan Kebraon, karena jika terdakwa bukan seorang Kepala Kelurahan, maka warga masyarakat tidak akan mau memberikan uang yang diminta oleh terdakwa.

#### 4. Unsur dilakukan secara berlanjut

Yang dimaksud secara berlanjut adalah beberapa perbuatan pidana antara yang satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang erat sedemikian rupa sehingga harus dipandangan sebagai perbuatan yang diteruskan/berlanjut berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada tahun 2011, terdakwa dalam kegiatan PRONA telah melakukan pemungutan biaya dari warga masyarakat serta pada bulan Juli 2011 terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi Eris Desnata untuk mengurus surat keterangan kematian, dan pada 9 agustus 2011 terdakwa juga telah meminta uang kepada saksi Heru Wahyono sebesar Rp 15.000.000,- namun

#### D. Faktor-faktor yang Memberatkan dan Meringankan Hukuman

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa:<sup>11</sup>

1. Hal-hal yang memberatkan : Terdakwa tidak membantu program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap korupsi.
2. Hal-hal yang meringankan : terdakwa belum pernah dihukum, mempunyai tanggungan keluarga dan bersikap di persidangan.

Oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini.

<sup>11</sup> Ibid, 80.

Memperhatikan Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini majelis hakim memutuskan:<sup>12</sup>

- <sup>12</sup> Ibid, 81.

Putusan tersebut dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 dengan dibantu oleh Drs, H, Syuhadak, SH, MH. Penitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada PN. Surabaya dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.